

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

¹Nadia Ayu Puspita, Retno Sunu Astuti²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H.Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id email
attapribadi98@gmail.com

Abstrak

Permasalahan tentang kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di banyak Kabupaten Provinsi Jawa Tengah mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menciptakan Program untuk mengurangi kasus penyalahgunaan dan kelangkaan pupuk bersubsidi karena masih ditemukan permasalahan yang umum terjadi berupa kelangkaan pupuk bersubsidi, keterlambatan distribusi pupuk, ketidaktepatan sasaran, dan harga yang di atas ketentuan dengan latar belakang tersebut terciptalah Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Melalui Kartu Tani yang digagas berdasarkan Peraturan Kementerian. Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten yang mengalami permasalahan kelangkaan pupuk subsidi sehingga Kartu Tani ini diterapkan salah satunya di Kecamatan Rembang sebagai wilayah yang menggunakan aktif dan penerimaan terbanyak Kartu Tani. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang dan menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang serta memberikan rekomendasi agar Kartu Tani dapat digunakan secara efektif. Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif melalui teori tingkatan sebuah Efektivitas Program oleh Sutrisno. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Program Kartu tani dapat diketahui melalui tahap awal penerapan hingga kartu tani dapat dijalankan secara normal, Ketepatan sasaran dapat diketahui ketika kartu tani diterima Petani yang telah memenuhi syarat lengkap, Ketepatan waktu Program sampai Tujuan meneyeluruh ketika pupuk subsidi dapat dijamin ketersediannya dan kegiatan transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi berjalan secara tertib adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain meskipun kendala kesiapan sistem seperti mesin EDC, kondisi lingkungan yang berbeda pada beberapa Desa yang lain dan kesiapan agen pelaksana para petani yang dominan petani lanjut usia untuk sering dilakukan pendampingan.

Kata Kunci: *Efektivitas Program, Kartu Tani, Pupuk bersubsidi.*

THE EFFECTIVENESS OF THE FARMER CARD PROGRAM IN THE DISTRICT OF REMBANG

¹Nadia Ayu Puspita, Retno Sunu Astuti²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H.Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id email attapribadi98@gmail.com

Abstract

The problem regarding the scarcity of subsidized fertilizers that occurred in many districts of Central Java Province prompted the Governor of Central Java Ganjar Pranowo to create a program to reduce cases of misuse and scarcity of subsidized fertilizers because common problems were still found in the form of scarcity of subsidized fertilizers, delay in distribution of fertilizers, inaccurate targets and prices above which the provisions against the background create the Subsidized Fertilizer Distribution Program. Through the Farmer's Card, which was initiated based on a Ministry Regulation. Rembang Regency is a regency that is experiencing the scarcity problem of subsidized fertilizers so that the Farmers Card is implemented in one of them in Rembang District as an area that uses the most active use and receives the Tani Card. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the Farmer Card Program in the Rembang District and to analyze the factors inhibiting the effectiveness of the Farmer Card Program in the Rembang District and to provide recommendations so that the Farmers Card can be used effectively. This type of research is descriptive using a qualitative approach through the level theory of a program effectiveness by Sutrisno. The results of this study indicate that the understanding of the Farming Card Program can be seen through the initial stages of application until the farmer cards can be run normally, the accuracy of targeting can be seen when the farmer cards are received by farmers who have met complete requirements, the timeliness of the program until the objectives are complete when subsidized fertilizers can be guaranteed. The availability and transaction activities of the Subsidized Fertilizer redemption were carried out in an orderly manner while the inhibiting factors were found, among others, despite the system readiness constraints such as EDC machines, different environmental conditions in several other villages and the readiness of implementing agents for farmers who were predominantly elderly farmers to be frequently assisted.

Keywords: *Effectiveness of program, Farmers Cards, Subsidized Fertilizer.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang adil dan makmur memiliki tugas penting melaksanakan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan terutama hak dasar bagi setiap rakyat, negara berkewajiban mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perlindungan, terutama bagi para pelaku pertanian yang terarah, tersusun rencana yang baik dan bersifat kontinu. Dalam undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani tepatnya pada nomor 19 tahun 2013 yang bertujuan untuk memberi peningkatan pada taraf kesejahteraan dan kualitas di kehidupan para petani, mengetahui bahwa pertanian adalah sektor fundamental di Indonesia.

Pada asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwasannya untuk menyelenggarakan asas tersebut diperlukan memperhatikan suara aspirasi para petani serta pemangku kepentingan dengan dibekali layanan informasi yang mudah untuk diakses dan digunakan oleh Masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan para petani dengan program subsidi input usaha tani yang antara lain

terdapat dalam subsidi pupuk ataupun benih dan juga penerapan teknologi agar mampu meningkatkan kemampuan produktivitas usaha tani.

Kegiatan usaha tani tidak akan pernah lepas dari permasalahan pemupukan maka melalui program Pemerintah dengan adanya subsidi pupuk diharapkan para petani mendapat keringanan terhadap mahalnya biaya pembelian pupuk, namun ketika program tersebut diimplementasikan kedalam masyarakat terdapat beberapa masalah antara lain kelangkaan pupuk bersubsidi dan petani yang seringkali membeli pupuk subsidi tanpa memikirkan kuota kebutuhan pupuk untuk usaha tani, sedangkan jumlah tersediaanya pupuk subsidi di pengecer/penjual terhitung rendah namun petani membeli pupuk subsidi melebihi dosis anjuran sehingga mengakibatkan tingginya harga jual pupuk, hal ini disebabkan karena ketidakmerataan distribusi yang tersistem dengan baik pada tingkat wilayah ataupun provinsi.

Permasalahan pendistribusian pupuk ini juga terjadi di Wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Rembang dalam upaya

meningkatkan sumbu keberhasilan pertanian tetap mendapatkan problema karena daerah ini mempunyai potensi pertanian yang hampir semua wilayah daratannya didominasi dengan mata pencaharian sebagai seorang Petani, untuk menjaga kestabilan produksi Hal ini di buktikan berdasarkan PDB tahun 2017 pada sektor Bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan data lapangan usaha pada triwulan II tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa ketiga bidang itu mengalami kenaikan 9.93 persen yang didapatkan dari kuartal sebelumnya yang mana mengalahkan laju pertumbuhan jasa perusahaan yang tumbuh yaitu sekitar 3.37 persen menurut data Badan Pusat Statistik 2017

Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk , untuk itu perlunya meningkatkan produksi beras dan diperkirakan bahwa di tahun 2020 kebutuhan beras berjumlah 35,97 juta ton dengan adanya asumsi 137 Kg per tahun

hal ini telah dianalisis dengan melihat faktor yang sangat berpengaruh dengan baik salah satunya yaitu input penggunaan pupuk yang baik dan teratur, namun pada kenyataannya yaitu diketahui Kabupaten Rembang sendiri dalam Realisasi penyaluran pupuk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 2016 dalam tiga bulan pertama terbilang rendah karena haanya mencapai 12.712 ton atau 21,7% diambil dari alokasi pupuk 58.475 ton, hal ini sangat dikhawatirkan karena hampir memasuki musim kemarau.

Kabupaten Rembang memiliki rata-rata alokasi pupuk padi dengan jumlah kurang dari 58,475 Ton per tahun, perhitungan sejak tahun lalu hingga tahun ini produksi padi terjadi adanya masalah fluktuasi yang disebabkan oleh faktor alam yaitu curah hujan yang cukup rendah sehingga realisasi tanam rendah di tahun 2016 pada Bulan Oktober sampai tahun 2017 Bulan Maret terhitung 61% atau sama dengan 21.500 Ha. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi adanya bentuk resiko-resiko seperti serangan penyakit tanaman dan serangan hama, pemupukan yang kurang tepat dan benih dasar

dengan kualitas yang buruk. Hal ini membutuhkan bahwa kegiatan usaha tani di Kabupaten Rembang memiliki banyak resiko usaha tani yang muncul ketika proses pra-panen atau proses budidaya sampai pada waktu pasca panen. Beberapa resiko dapat diketahui tingkatannya melalui standart deviasi dengan memberikan deskripsi resiko yang saat itu terjadi untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi pada kegiatan usaha tani lalu dipengaruhi pula dengan permasalahan keterlambatan penyaluran pupuk di Gudang Kabupaten Rembang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu telah menambah persediaan pupuk urea untuk Rembang, hal ini disebabkan adanya musim tanam padi yang bersamaan ini mengakibatkan gudang pupuk urea tidak sanggup melayani penebusan pupuk karena hanya terdapat1 (satu) lokasi sehingga membuat antrian yang cukup padat dan mengakibatkan pengiriman yang lambat. Hal ini dapat dianalisis dengan tepat untuk memberi solusi dalam kegiatan usaha tani. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya memangkas risiko tersebut telah memberlakukan adanya seruan dari

Program yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanganani terkait permasalahan pupuk subsidi adalah menciptakan Program *(Kartan) Kartu Tani*.

Tujuan dari program Kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktanya yang terjadi dilapangan adalah belum terwujudnya tujuan dan manfaat kartu tani tersebut dengan adanya beberapa masalah seperti kurang cermatnya validasi data kartu tani terdapat kecurangan dalam pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani , belum

sanggupnya gudang pupuk dalam melayani penebusan pupuk serta sulitnya koordinasi dalam menerapkan program kartu tani antara petani, pemilik kios dan petugas penyuluh pertanian. Hal ini sangat berpengaruh ketika kartu tani tidak digunakan secara optimal maka tujuan dan bantuan sosial serta yang utama manfaat kartu tani dalam menstabilkan ketersediaan pupuk subsidi tidak dirasakan secara langsung oleh para petani.

Penerapan Program Kartu Tani berjalan sejak tahun 2017 yang dilaksanakan pada 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah. Penyuluh Pertanian Sebagai ujung Tombak dalam pelaksanaan pendataan luas lahan per petani. Tugas ini tidaklah mudah karena dilapangan pasti banyak ditemui persoalan-persoalan yang menghadang, hal tersebut menjadikan pentingnya kegiatan ini. Kabupaten Rembang telah berhasil merilis Kartu Tani pada Tahun 2017 dan tercatat sebagai penggunaan kartu tani pada sepuluh besar kabupaten gelombang ke-2 di Provinsi Jawa Tengah, namun pada pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul

dilapangan. Diantaranya para petani di Kecamatan Rembang yang sudah menjadi Gabungan kelompok petani namun Dintapan Kabupaten Rembang belum bisa membagikan Kartu tani secara tuntas, masih terdapat data yang menunjukkan bahwa tidak 100% pembagian kartu tani sampai kepada semua petani karena masih banyak petani yang termasuk golongan Petani tua dan beberapa dari lainnya kurang bisa mengoperasikan Teknologi serta tidak dapat ditemui ketika kartu tani hendak dibagikan sedangkan aturan yang tepat Kartu ini harus diterapkan pada prosedur tetap pemberian kartu tani oleh Bank BRI.

Kartu Tani bukan hanya sekedar yang dijalankan namun demi suksesnya program kartu tani di wilayah Kecamatan Rembang kabupaten bagi semua pegawai penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pegawai BRI yang telah ditugaskan sebagai penganggung jawab penyaluran Kartu Tani. diminta melakukan operasi ke lapangan. Tak hanya PPL saja namun Kepala Desa dan perangkat desa juga sangat penting untuk ikut mengawal kartu tani pada Gerakan

Serentak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. Maka hal itu akan disayangkan ketika kegiatan ini tidak dilakukan dari semua sektor yang menyangkut produk Kartu Tani. Kartu Tani yang dilaksanakan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang belum mampu mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang ber-asas 6 tepat karena masih mengalami keterlambatan pendistribusian pupuk dan kelangkaan pupuk subsidi serta program pemberian layanan perbankan untuk tiap petani belum dapat dirasakan langsung oleh Petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Merujuk pada penjelasan diatas dapat ditemukan Pertanyaan Penelitian yaitu Mengapa Kartu Tani belum konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan kelompok petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ?

2. Apa faktor-faktor penghambat Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Definisi Administrasi oleh Rosenbloom (2005), dalam Pasolong 2017 Administrasi Publik adalah Pemnafaatan teori-teori dan proses manajemen, politik dan Hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap Masyarakat secara keseluruhan dan sebagian . Selanjutnya Pasolong (2017:19) menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara

efisien dan efektif. Beberapa definisi telah dijelaskan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah Seluruh Proses kegiatan Pemerintah yang mencakup kepentingan Masyarakat melalui pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Manajemen Publik yang baik.

2. Paradigma Administrasi Publik

Denhardt dan Denhardt menjelaskan bahwasannya pada 3 (tiga) Prespektif pada Paradigma Administrasi Publik antara lain :

1. Old Public Administration

atau sebagai Administrasi Publik Klasik memiliki fokus perhatian pada interkasi dan kerjasama di dalam Organisasi pemerintah yang dibangun melalui Hirarki dalam penjelasnya Pemerintah melakukan kegiatan Administrasi dengan cara yang efisien, efektif serta bebas dari manipulasi untuk bisa beroperasi secara tepat (Wilson, 1887). Old Public Administrasion bercirikan sebagai berikut :

- Pelayanan bermoral

- Aparat berteladan
- Loyalitas akan penguasanya
- Prosedur Birokrasi yang Formal

1. New Public Management adalah bentuk reformasi karena ketika organisasi publik diidentikan dengan tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif serta miskin inovasi. Pendekatan NPM ini menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance*, dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Government* itu sendiri. Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan

lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

- Bekerja pada sektor privat bisnis dan publik
- Menjelaskan adanya Good Governance
- Efektif dan Efisien pada pekerjaan sektor Swasta
- Terlihatnya pelayanan sipil dan mulai menganut kontrak kerja
- Sistem anggaran dinilai berdasarkan Kinerja dan Hasil

2. **New Public Service** timbul karena Perspektif NPM memperoleh kritik keras dari banyak pakar. Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif *Old Public Administration*, tidak hanya membawa teknik administrasi baru namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai-nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi.

3. **New Public Service** adalah teori manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan

persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan.

- Pemerintahan yang berdemokrasi
- Kepentingan Administrasi publik yang sifatnya lebih banyak mendengar aspirasi
- Kerja sama yang banyak membentuk adanya Jaringan Kerja
- Mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Dari penjelasan teori Administrasi Publik diatas peneliti menggunakan Paradigma *New Public Management* (NPM)

4. **Manajemen Publik**

Manajemen Perintahan umum juga dikenal sebagai Manajemen Publik artinya Pemerintah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara melalui sarana dan prasarana.

Manajemen menjadi unsur yang penting ketika menyelenggarakan organisasi pada sektor publik seperti halnya Organisasi Pemerintah dan swasta. Orientasi Keputusan Sektor Publik tidak berdasar pada pemeliharaan individu dalam pasar namun pemilihan kolektif setelah itu akan disampaikan oleh para perwakilan yaitu Partai Politik atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sektor Publik menghadapi permasalahan tentang mendistribusikan kesejahteraan sosial sedangkan pada sektor swasta tidak memikirkan tanggung jawab untuk memikirkan kepentingan membagi keadilan sosial. Organisasi sektor publik pada kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, pada beberapa hal rakyat adalah pelanggan, namun pada keadaan tertentu rakyat juga bukan sebagai pelanggan. Sektor Swasta kompetisi menjadi instrument pasar sedangkan pada sektor publik tindakan kolektif sebagai instrument Pemerintah, hal itu yang menjadi sulit ketika pemerintah harus memenuhi setiap kebutuhan masyarakat secara kolektif. Pendekatan

Manajerialisme yang memiliki tujuan dalam pemenuhan tujuan demi mencapai visi dan misi dan pemenuhannya bersifat jangka panjang, beberapa fungsi strategik, seperti perencanaan dan pembuatan program yang mana harus dilakukan oleh Manajer publik, terdapat tiga fungsi yang dijelaskan Alison dalam buku Mahmudi secara umum yang berlaku pada sektor publik ataupun swasta terdiri dari :

1. Fungsi Strategi

- a. Penetapan prioritas serta tujuan organisasi tersebut
- b. Demi mencapai tujuan harus membuat perencanaan operasional

2. Fungsi Manajemen Komponen Internal

- a. Menyusun staff dan mengorganisasikan
- b. Manajemen Sumber daya manusia yang terarah
- c. Kinerja yang terkendali

3. Fungsi Manajemen Konstituen Eksternal

- a. Hubungan pada Unit Eksternal Organisasi
- b. Hubungan di Organisasi lainnya
- c. Hubungan Publik dengan Pers

5. Efektivitas

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan istilah yang diungkapkan dengan cara yang berbeda dan dengan orang yang berbeda pula. Menurut Chung dan Megginson yang disebut dengan efektifitas adalah kemampuan tingkat dalam pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar suatu organisasi itu tetap hidup. Menurut Subagyo (2000) bahwa efektifitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan Makna efektifitas menurut Hadayaningrat, (1995:16) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Beberapa definisi telah dijelaskan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa

Efektivitas adalah Ukuran suatu pencapaian dalam mencapai target yang direncanakan.

6. Efektivitas Program

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian dalam efektifitas suatu program, karena Efektivitas penerapan Kartu Tani di Kecamatan Rembang masuk ke dalam lingkup tingkat keberhasilan suatu program, sehingga Keberhasilan penggunaan Kartu Tani juga dilihat secara keseluruhan, yaitu dari efektifitas Programnya sehingga peneliti menggunakan teori menurut Sutrisno (2007:125-126) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program adalah :

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan suatu program
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program tersebut
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah

sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) menyebutkan faktor yang mempengaruhi efektifitas dan dari suatu program yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan, yakni menurut Fadil Ali, et al (2011) dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan dari kondisi alam (geografis).
2. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program.

B. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dekriptif kualitatif dengan situs penelitian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, dan gambar. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Program

Pemahaman Program dapat dilihat melalui bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan Program Kartu Tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. pelaksanaan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada awalan pemerintah dalam mengenalkan agar penerima dan agen pelaksana paham akan program kartu tani sampai proses

dimana kartu tersebut bisa digunakan dengan melalui beberapa tahap mulai dari pendataan dan verifikasi data oleh petugas, yang dilanjutkan dengan penerbitan kartu tani oleh pemerintah, selanjutnya pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, dan terakhir adalah penjualan hasil panen.

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan atau keberhasilan Sasaran dilihat berdasarkan latar belakang dan sasaran program. Latar belakang program kartu tani berasal dari berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi latar belakang atau dasar penerapan kartu tani untuk masyarakat. Program kartu tani dibuat atas dasar berbagai permasalahan yang menyangkut kesejahteraan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi Dengan demikian adanya kartu tani dapat mengontrol pendistribusian pupuk bersubsidi pada masyarakat khususnya para petani. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang lebih spesifik dari adanya tujuan program. Di dalam variabel ini diukur melalui sasaran pada petani

yakni yang menggunakan kartu tani, dimana sasarannya adalah petani baik yang menggarap maupun yang memiliki lahan sepenuhnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penerima kartu tani di Kabupaten Rembang

Tabel 1.1

Jumlah Kartu Tani yang diterima di Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan Rembang	Kartu yang diterima	Total Kartu tidak dapat terbagi
1.	Kaliori	6.469	900
2.	Kragan	1.650	90
3.	Lasem	2.516	23
4.	Pamotan	12.488	725
5.	Pandangan	2.627	373
6.	Rembang Kota I	2.023	220
7.	Rembang Kota II	2.673	399
8.	Sale	4.652	557
9.	Sarang	5.704	323
10.	Sedan	5.938	980
11.	Sluke	2.907	9
12.	Sulang	12.805	144
13.	Sumber	8.969	39

14.	Sumber Agung	3.495	480
		74.916	5.262

Sumber : Rekap Kartu Tani Kabupaten Rembang 2019

Terkait dengan keberhasilan sasaran dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani jika ingin memiliki kartu tani yakni harus tergabung menjadi anggota kelompok tani, kemudian mengumpulkan berkas-berkas administrasi seperti fotocopy ktp, kartu keluarga, dan spt atau surat pajak tanah.

3. Ketepatan Waktu

Pada Aspek tingkat Ketepatan waktu hal yang penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini yaitu ketika suatu program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang maka semakin efektif program tersebut dapat terealisasi dengan melihat keadaan Masyarakat khususnya para petani dalam memberikan respon baik, seperti halnya Petani merasa sangat terbantu dan puas akan pelayanan Pemerintah dalam prioritas kepentingan para petani dalam memajukan kesejahteraan para Petan. Kartu Tani sebagai program yang dapat diukur efektivitas pelaksanaannya termasuk dalam aspek memberi dampak yang baik serta kepuasan Masyarakat khususnya

petani untuk memiliki identitas kartu sebagai alat pembayaran pupuk sehingga tidak ada lagi pupuk bersubsidi bermasalah dan langka hal ini didukung dengan baiknya ketepatan waktu yang teratur tengah dilaksanakan secara bertahap kepada setiap Desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sehingga kartu tani dapat dimanfaatkan dan memberi keuntungan untuk petani secara efektif. Pada Program pemerintah tentang pengadaan Subsidi Pupuk mempunyai manfaat yaitu :

- Melindungi Petani dari dampak lonjakan Harga Pupuk
- Mendukung upaya peningkatan pendapatan usaha tani
- Mencegah penurunan penggunaan pupuk dan efisiensi pemupukan
- Mencegah penurunan kapasitas produksi pertanian
- Mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan
- Mendukung terpeliharanya stabilitas sosial politik

4. Tercapainya Tujuan

Pada Tercapainya tujuan untuk menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada suatu program dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal

program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini dapat dicapai dan program kartu tani yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan termasuk didalamnya menyangkut peran Kepala Penyelenggaraan kerjasama dan penyuluhan dan petugas penyuluh pertanian Kabuapten Rembang didaerah Kecamatan Rembang dalam struktur kerja yang diinformasikan narasumber bahwa Sosialisasi , pelatihan dan pendampingan selama ini sebagai bentuk dari usaha pemerintah dalam menerapkan program Kartu Tani dari mulai pendataan hingga dapat digunakan oleh masing-masing petani penerima Kartu Tani selain itu juga upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat sangat terbantu ketika terjadi suatu kendala atau permasalahan tentang kartu tani pemerintah akan dengan cepat dan tepat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu pemerintah juga mengupayakan pemodalan agar petani bisa membeli pupuk tepat waktu dengan adanya dana PUAP dan KUR.

5. Perubahan Nyata

Dari aspek Perubahan nyata untuk mengetahui bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian sasaran dari program disini juga berperan penting dalam melaksanakan

program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Artinya dengan melihat, meninjau, dan meneliti langsung apakah memeberikan perubahan bagi para warga masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam kategori positif maupun negatif dari Program kartu tani dilihat terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi dengan asas 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu,dan tepat harga. Dari 6 (enam) asas tersebut masih perlu diperbaiki pada asas waktu, yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang masih perlu di rubah. Masyarakat menganggap bahwa program kartu tani ini sudah cukup baik. Dengan adanya kartu tani ini sangat membantu bagi masyarakat yang menggunakan pupuk bersubsidi, dimana masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan pupuk bersubsidi. Program kartu tani berdampak baik bagi pemerintah maupun masyarakat petani. Dampak yang dirasakan oleh pemerintah seperti kemudahan untuk mengontrol pembelian pupuk. Bagi masyarakat merasa lebih mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan tertib dan teratur. dari beberapa indikator tersebut, efektivitas program kartu tani di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dalam menggunakan kartu

tani. Namun masih perlu beberapa perbaikan seperti pada kemampuan Sumber Daya Manusia agar kartu tani ini lebih efektif, dikarenakan Sumber Daya Manusiain (SDM) di kecamatan Rembang khususnya petani masih cukup rendah dan sudah berumur lanjut usia.

D. Kesimpulan

1. Pemahaman Program Kartu Tani di Kabupaten Rembang telah dilakukan dengan tahap awal pengenalan Kartu kepada para petani hingga produk tersebut dapat digunakan dan dipahami betul secara normal namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya karena Kartu ini tersambung dengan teknologi yang menuntut para agen pelaksana mempelajari untuk menjadi terbiasa.
2. Ketepatan sasaran dimana Kartu tani ini diterima kepada petani yang tepat akan data dan validitasnya sehingga serta Kartu Tani diterima oleh petani yang memang memenuhi persyaratan tertentu seperti halnya kartu dapat diterima hanya oleh pemilik lahan yang tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
3. Ketepatan Waktu hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program Kartu tani yang dilaksanakan pada awal 2017 lalu dijalankan bertahap untk segera mampu menangani permasalahan pupuk maka terjaminnya persediaan pupuk yang tersedia tepat pada sebelum kegiatan usaha tani atau pra-panen serta keamanan pada

proses pembelian atau penebusan pupuk yang terhindar dari kecurangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ini terkontrol.

4. Tercapainya Tujuan yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh pemerintah dimulai dengan Sosialisasi oleh pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Rembang secara berkelanjutan , dan pedampingan yang sangat baik oleh PPL Dintapan Rembang karena harus memaklumi beberapa petani yang lanjut usia yang masih kesulitan menggunakan Kartu Tani serta selalu melakukan evaluasi kepada Kios pengecer resmi untuk mendata keluhan yang nanti akan diselesaikan dan disampaikan pada forum pertemuan Kartu Tani se-Kabupaten Rembang, serta tercaointa tujuan yang dihasilkan dari pemerintah yang telah lakukan adalah Program ini sangat memudahkan untuk Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang dalam mengontrol kebutuhan pupuk dan menciptakan ilmu baru untk sadr akan pentingnya suatu teknologi.
5. Perubahan Nyata terhadap tujuan yang dapat diketahui melalui aspek pendistribusian yang mengarah pada asas 6 tepat sudah mulai dirasakan di Kecamatan Rembang khususnya di Desa Gedangan karena ketepatan jumlah , waktu dan jenis pupuk yang ditebus selalu tersedia di

Distributor hanya terdapat kendala yang sulit dihindari yaitu tentang manajemen waktu pelayanan yang kurang tepat sehingga menimbulkan gesekan antar petani ketika hendak menebus pupuk di Kios yang terlalu ramai karena antrian transaksi dan masalah sistem alat EDC yang sering mengalami gangguan sinyal dan seringkali kartu tani tidak dapat dilihat kuota yang tercantum karena sistem yang belum siap.

E. Saran

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian Program Kartu Tani Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yaitu Perlunya peranan yang aktif dilakukan oleh para pejabat tingkat Kecamatan dan Desa yang mampu menggerakkan kebijakan dan manajemen Program Kartu Tani di tingkat tersebut serta peran stakeholder dalam memberikan manfaat optimal BUMDES dalam membantu penyediaan dana usaha pertanian penyediaan gudang penyimpanan hasil Pertanian tiap-tiap Desa Kecamatan Rembang serta peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Bank BRI untuk berkoordinasi dalam kepentingan memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, kegiatan proses pupuk bersubsidi untuk dilakukan monitoring seperti pembentukan SATGAS Pengawas

Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Yahya Shafiyudin dan JuliaInka Christie. Ketersediaan dan kebutuhan, mengevaluasi pelaksanaan dan merumuskan saran dalam pengembangan distribusi pupuk di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah

Etik Kurniawati dan Andri Kurniawan Persepsi terhadap penggunaan Kartu Tani serta Tata kelola Pupuk Bersubsidi dan pengaruh Topografi suatu daerah yang dapat memengaruhi hasil penggunaan Kartu Tani Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Meliyanawati, Wulan Sumekar, Tutik Dalmiyatun Motivasi Petani Tanaman Padi Terhadap Adopsi Program Kartu Tani di Kabupaten Grobogan. Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.

Lutfil Chakim, Amzul Rifin, dan Bunasor Sanim. Efektivitas Penerapan Kartu Tani dan Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Program Studi Manajemen dan
Bisnis, Sekolah Bisnis IPB.

South-Western Cengage Learning:
USA

Mufidah dan Indah Prabawati, S. Sos, M.
Implementasi program penyaluran
pupuk bersubsidi melalui Kartu
Tani di Desa Durung Bedug
Candi Sidoarjo. Jurnal Jurusan
administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Sosial dan hukum Universitas
Negeri Surabaya

Gibson, L. James, dkk. 2012.
Organizations: Behaviour,
Structure, Processes, Fourteenth
Edition. The McGraw-Hill
Companies: New York

Mutiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani,
MM Efektivitas Program Kartu
Tani di Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara.
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro.

Pasolong, Harbani. 2017. Teori
Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Robbins, Stephen P., and Neil Barnwell.
2002. Organization Theory,
Concept And Case, 4Th Edition,
Prentice Hall, New South Wales.

Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A.
2013. Organizational Behavior
Edition 15. New Jersey: Pearson
Education

BUKU

Abdul Wahab, S. Analisis Kebijakan
Publik Teori dan Aplikasinya.
Malang. PT Danar Wijaya, 1999

Siagian, P Sondang. 2009. Administrasi
Pembangunan: Konsep, Dimensi,
Dan Strateginya. Jakarta: Bumi
Aksara

Abdul Wahab, S. Analisis Kebijakan
dan Formulasi ke Implementasi.
Kebijaksanaan Negara, Jakarta:
Bumi Aksara, 1997

DOKUMEN

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi
Negara. Bandung: Pustaka Setia

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang dalam
Pengawasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden
RI No. 15 Tahun 2011.

Daft, Richard L. 2010. Organization
Theory And Design, Tenth Edition.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
69/Permentan/SR.310/12/2016

tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian TA 2017.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi Petani di Provinsi Jawa Tengah.

Perjanjian Kerjasama antar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

dengan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Wilayah Yogyakarta, Nomor 049/2015, Nomor B.137 KW-VIII/PRG/05/2015, Nomor B.2002 KW-VII/PRG/05/2015, Tanggal 8 Mei 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.1/014723, Tanggal 21 September 2015 , tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

